



POLITIK UANG

DIGITAL

Tantangan dan Strategi Pencegahan



UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu hak cipta atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Politik Uang Digital: Tantangan dan Strategi Pencegahan

Dr. Mario Tulenan Parinsi S.Kom, MTI.

Kerjasama



Jurusan Pendidikan Geografi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Manado

Politik Uang Digital: Tantangan dan Strategi Pencegahan

Bitung © 2025, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara

Penulis: Dr. Mario Tulenan Parinsi S.Kom, MTI.

Diterbitkan oleh:



Jurusan Pendidikan Geografi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Manado

Referensi | Non Fiksi | R/D

xi+ 148 hlm. ; 14,5 x 21 cm

No. ISBN : xxx-xxx-xxx-xxx-x

No. ISBN (PDF) : xxx-xxx-xxx-xxx-x

Cetakan Pertama, Maret 2025



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Hak cipta dilindungi undang - undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis penerbit.

All right reserved

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku "Politik Uang Digital: Tantangan dan Strategi Pencegahan" karya Dr. Mario Tulenan Parinsi S.Kom, MTI. dapat diterbitkan.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, praktik politik uang pun telah bertransformasi mengikuti arus perubahan zaman. Buku ini hadir sebagai respons kritis terhadap fenomena tersebut, menyajikan analisis komprehensif tentang modus operandi politik uang digital serta strategi pencegahannya yang inovatif.

Sebagai upaya menjaga marwah demokrasi Indonesia di era transformasi teknologi, buku ini dihadirkan untuk membedakan ancaman, celah sistemik, sekaligus merumuskan solusi inovatif dalam menghadapi praktik politik transaksional yang kian mengglobal. Penulis dengan cermat mengupas berbagai aspek mulai dari evolusi praktik politik uang, modus operandi terkini, hingga dampaknya terhadap integritas pemilu.

Yang patut diapresiasi, buku ini tidak hanya berhenti pada tataran analisis, namun juga menawarkan strategi pencegahan berbasis teknologi dan kolaborasi multisektor. Pembaca diajak untuk memahami peran teknologi blockchain, kecerdasan buatan, serta pentingnya literasi digital dalam membangun sistem pengawasan yang efektif.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi berharga bagi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari

penyelenggara pemilu, akademisi, praktisi hukum, hingga masyarakat umum yang peduli akan masa depan demokrasi Indonesia. Semoga upaya ini dapat berkontribusi dalam membangun ekosistem politik yang lebih berintegritas dan tahan terhadap godaan politik uang di era digital.

Akhir kata, kami mengucapkan selamat kepada penulis atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menghadirkan karya yang sangat relevan ini. Semoga buku ini dapat menginspirasi langkah-langkah konkret menuju pemilu yang lebih berkualitas dan demokrasi yang lebih bermartabat.

Bitung, Maret 2025

Ketua Bawaslu Kota Bitung

Deiby A. Londok

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, buku yang mengupas tuntas fenomena politik uang digital ini dapat diselesaikan. Sebagai upaya menjaga marwah demokrasi Indonesia di era transformasi teknologi, buku ini dihadirkan untuk membedah ancaman, celah sistemik, sekaligus merumuskan solusi inovatif dalam menghadapi praktik politik transaksional yang kian mengglobal.

Perkembangan teknologi finansial dan digitalisasi sistem pemilu telah membuka babak baru dalam dinamika demokrasi. Sayangnya, kemajuan ini juga dimanfaatkan untuk memodifikasi praktik politik uang melalui dompet digital, cryptocurrency, manipulasi media sosial, hingga aliran dana lintas batas. Situasi inilah yang mendorong penulis untuk mendokumentasikan analisis sekaligus strategi pencegahan berbasis teknologi dan kolaborasi multisektor.

Dinamika politik yang begitu dinamis pada akhirnya membawa dampak pada adanya upaya-upaya negatif kontestan melalui bentuk politik uang. Ditengah berkembangnya teknologi digital maka perbuatan politik uang pada akhirnya turut bertransformasi. Modus seperti transfer mikro via e-wallet, dan yang lainnya memerlukan pendekatan antisipatif. Melalui buku ini, pembaca diajak memahami:

1. Perkembangan politik uang dari era konvensional ke digital.
2. Peran teknologi blockchain dan AI dalam pengawasan.

3. Strategi pemberdayaan masyarakat sipil melalui literasi digital.
4. Rekomendasi kebijakan progresif untuk pemilu berintegritas.

Penulis juga tidak menampik adanya keterbatasan, terutama dalam hal penulisan yang kurang lengkap. Kritik dan saran dari akademisi, praktisi, serta masyarakat umum sangat diharapkan untuk penyempurnaan edisi mendatang.

Akhir kata, buku ini diharapkan memberi manfaat wawasan pengetahuan bagi seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga generasi muda dalam merawat integritas demokrasi yang terus terancam oleh politik uang apalagi di tengah makin berkembang pesatnya teknologi digital.

Manado, Februari 2025

Dr. Mario Tulenan Parinsi S.Kom, MTI

DAFTAR ISI

<i>KATA SAMBUTAN.....</i>	<i>ii</i>
<i>KATA PENGANTAR.....</i>	<i>iv</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>vi</i>
<i>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</i>	<i>ix</i>
<i>BAB 1 – Evolusi Politik Uang di Era Digital.....</i>	<i>1</i>
A. Transformasi Praktik Politik Uang Dari Tunai Ke Digital.....	1
B. Pemanfaatan Dompet Digital dan Uang Elektronik Untuk Transaksi Politik Uang	10
C. Tantangan Baru Dalam Pengawasan dan Pencegahan	18
<i>BAB 2 – Modus Operandi Politik Uang Digital</i>	<i>22</i>
A. Identifikasi nomor telepon potensial pemilih	22
B. Transfer dana melalui platform keuangan digital ...	24
C. Penggunaan cryptocurrency dan teknologi blockchain.....	27
D. Kampanye terselubung melalui media sosial.....	29
<i>BAB 3 – Dampak Politik Uang Digital Terhadap Integritas Pemilu.....</i>	<i>31</i>
A. Distorsi Proses Demokrasi	31

B.	Ketimpangan Kompetisi Antar Kandidat.....	36
<i>BAB 4 – Kerangka Hukum dan Regulasi</i>		<i>41</i>
A.	Analisis UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.....	41
B.	Celah Hukum Dalam Pengaturan Transaksi Digital Untuk Kepentingan Politik	42
C.	Urgensi Pembaruan Regulasi Menghadapi Tantangan Era Digital	45
<i>BAB 5 – Peranan Lembaga</i>		<i>47</i>
A.	Strategi Bawaslu Dalam Pencegahan Politik Uang Digital	47
B.	Kolaborasi PPAK Dalam Mendeteksi Transaksi Mencurigakan	55
C.	Penguatan Kapasitas Tim Cyber Untuk Monitoring Media Sosial.....	59
<i>BAB 6 – Strategi Pencegahan Komprehensif.....</i>		<i>61</i>
A.	Pendidikan Publik dan Kampanye Kesadaran.....	61
B.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan.....	65
C.	Pemanfaatan Teknologi Untuk Transparansi Dana Kampanye.....	67
D.	Penguatan Kerjasama Antar Lembaga.....	69
<i>BAB 7 – Inovasi Teknologi Dalam Pencegahan</i>		<i>72</i>
A.	Pengembangan Sistem Deteksi Dini Transaksi Mencurigakan	72

B.	Implementasi Blockchain Untuk Transparansi Dana Kampanye.....	77
C.	Artificial Intelligence Untuk Monitoring Media Sosial	82
<i>BAB 8 – Membangun Integritas Pemilu Era Digital</i>		<i>86</i>
A.	Penguatan Literasi Digital	86
B.	Pemberdayaan Komunitas Untuk Pengawasan Partisipatif	91
C.	Membangun Budaya Politik Berintegritas.....	95
<i>BAB 9 – Penutup.....</i>		<i>101</i>
A.	Tantangan dan Strategi Kunci	101
B.	Rekomendasi Kebijakan Untuk Pemilu Berintegritas di Era Digital	106
C.	Visi Pemilu Masa Depan Yang Bersih Dari Politik Uang	111
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>		<i>120</i>
<i>BIODATA PENULIS</i>		<i>148</i>

RINGKASAN EKSEKUTIF

Politik uang digital telah menjadi ancaman serius bagi integritas demokrasi di Indonesia. Praktik ini memanfaatkan teknologi finansial dan media sosial untuk menyalurkan dana ilegal secara terselubung kepada pemilih. Beberapa temuan kunci menunjukkan bahwa 23% pelanggaran pemilu 2024 melibatkan transfer dana melalui dompet digital, sementara 67% masyarakat Indonesia meragukan keadilan proses politik akibat maraknya politik uang. Praktik ini juga menyedot 15-20% APBD kabupaten untuk "biaya transaksional" politik.

Tantangan utama dalam mengatasi politik uang digital mencakup kompleksitas transaksi digital yang sulit dilacak, regulasi yang tertinggal dari perkembangan teknologi, dan keterbatasan kapasitas lembaga pengawas. Persepsi masyarakat yang menganggap praktik ini normal juga menjadi hambatan, ditambah dengan kejahatan lintas batas yang sulit dipantau. Anonimitas teknologi seperti dompet digital dan cryptocurrency memungkinkan aliran dana ilegal dilakukan secara terselubung, sementara UU Pemilu yang ada belum mengatur secara eksplisit modus-modus modern seperti pemanfaatan NFT atau airdrop token.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi komprehensif yang meliputi reformasi regulasi, inovasi teknologi pengawasan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan edukasi publik. Reformasi regulasi harus mencakup perluasan definisi politik uang dalam UU Pemilu untuk mengakomodasi transaksi digital, disertai sanksi pidana yang lebih berat. Inovasi teknologi seperti integrasi AI dan blockchain dapat membantu mendeteksi pola transaksi

mencurigikan dan memastikan audit real-time dana kampanye.

Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan auditor digital bersertifikasi dan alokasi anggaran untuk pengembangan sistem analitik big data juga krusial. Edukasi publik harus dilakukan secara terstruktur, termasuk integrasi materi pendidikan demokrasi digital ke dalam kurikulum sekolah dan pesantren, serta kampanye di media sosial untuk meningkatkan literasi masyarakat.

Kolaborasi lintas sektor dan internasional juga penting untuk melacak aliran dana asing dan membangun sistem pengawasan yang lebih efektif. Peningkatan transparansi dana kampanye melalui pelaporan real-time berbasis blockchain dan pembatasan donasi maksimal dapat membantu mencegah penyalahgunaan dana. Perlindungan pelapor dan whistleblower melalui UU khusus juga diperlukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Tantangan politik uang digital bukan hanya masalah prosedural, tetapi ancaman nyata terhadap esensi demokrasi Indonesia. Solusi holistik yang menggabungkan ketegasan hukum, inovasi teknologi, partisipasi aktif masyarakat, dan reformasi sistem politik sangat diperlukan. Tanpa langkah konkret dan komitmen kolektif untuk menolak transaksi suara digital, demokrasi Indonesia berisiko tereduksi menjadi sekadar ajang lelang suara yang dikendalikan oleh kekuatan uang dan teknologi. Masa depan demokrasi bergantung pada kemampuan kita untuk memastikan bahwa kedaulatan

rakyat tidak dikalahkan oleh algoritma dan kekuatan finansial.

BAB 1 – Evolusi Politik Uang di Era Digital

A. Transformasi Praktik Politik Uang Dari Tunai Ke Digital

Politik uang merupakan ancaman serius bagi demokrasi dan keadilan sosial karena merusak prinsip dasar kedaulatan rakyat. Praktik ini mengubah pemilu dari ajang kompetisi gagasan menjadi transaksi beli-suara, di mana kandidat dengan modal besar—biasanya didukung oligarki atau korporasi—mendominasi panggung politik. Akibatnya, kekuasaan tidak dipegang oleh sosok yang kompeten atau berintegritas, melainkan oleh mereka yang mampu membayar mahal untuk dukungan. Di banyak daerah di Indonesia, kepala daerah terpilih justru terlibat korupsi anggaran daerah untuk "mengembalikan modal" kampanye, menciptakan siklus korupsi yang berdampak pada pembangunan yang timpang.

Di tingkat masyarakat, politik uang memperdalam ketimpangan sosial dengan menjadikan kelompok rentan sebagai objek eksploitasi. Rakyat miskin di pedesaan atau wilayah marginal sering dipaksa "menjual" suara demi iming-iming sembako, uang tunai, atau bantuan digital. Padahal, praktik ini hanya memberi keuntungan sesaat tanpa menyelesaikan akar kemiskinan. Data BPS (2023) menunjukkan bahwa di Nusa Tenggara Timur, 45% penerima bantuan politik masih hidup di bawah garis kemiskinan

BAB 2 – Modus Operandi Politik Uang Digital

A. Identifikasi nomor telepon potensial pemilih

Politik uang digital di Indonesia mengadopsi berbagai strategi yang memanfaatkan celah teknologi finansial. Sumber (Reza Pahlevi, 2023; TempoNews, 2024) mengungkapkan bahwa transaksi dilakukan melalui transfer dana ke dompet digital penerima, sering kali disamarkan sebagai "bantuan logistik" atau "uang transportasi" untuk melawan kampanye. Di Palembang, misalnya, praktik ini tidak lagi menggunakan uang tunai melainkan transfer via aplikasi dengan nominal Rp100.000–Rp300.000 per penerima (Reza Pahlevi, 2023). Beberapa kasus bahkan melibatkan skema per KK (Kartu Keluarga), di mana satu keluarga menerima hingga Rp1,5 juta melalui platform digital (Reza Pahlevi, 2023). Karakteristik utama modus ini adalah:

1. Anonimitas: Penggunaan akun dompet digital tanpa registrasi (unregistered e-wallet) memungkinkan pelaku menyembunyikan identitas (Anisah, 2023; Koran Sulindo, 2023).
2. Kecepatan Transaksi: Distribusi dana dapat dilakukan secara masif dalam hitungan menit ke ribuan penerima (Kadek Melda Luxiana, 2023; Sholatar, 2024).

BAB 3 – Dampak Politik Uang Digital Terhadap Integritas Pemilu

A. Distorsi Proses Demokrasi

Politik uang merupakan praktik yang sangat berbahaya dan dapat mendistorsi demokrasi secara signifikan. Fenomena ini terjadi ketika uang atau imbalan materi digunakan untuk mempengaruhi pilihan atau keputusan politik masyarakat, terutama dalam konteks pemilihan umum. Dampaknya sangat merusak integritas proses demokrasi karena mengganggu prinsip "satu orang, satu suara" yang menjadi landasan sistem demokrasi yang adil.

Ketika politik uang merajalela, kualitas kepemimpinan dan kebijakan publik menjadi terdegradasi. Hal ini terjadi karena kandidat yang terpilih bukan berdasarkan kompetensi, visi, atau program kerja mereka, melainkan karena kemampuan mereka membeli suara pemilih. Akibatnya, orang-orang yang memiliki sumber daya finansial besar namun belum tentu memiliki kapabilitas yang memadai dapat menduduki jabatan-jabatan penting. Sementara itu, kandidat berkualitas namun kurang mampu secara finansial menjadi tersisih dari arena politik.

Politik uang juga menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi politik. Kandidat atau partai dengan dana besar memiliki keuntungan yang tidak adil dibandingkan mereka yang memiliki sumber daya terbatas. Hal ini mengancam

BAB 4 – Kerangka Hukum dan Regulasi

A. Analisis UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat beberapa ketentuan penting terkait politik uang:

- a. Larangan politik uang: UU ini secara tegas melarang praktik politik uang dalam pemilu. Pasal 523 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada pemilih (Rizki, 2023).
- b. Sanksi hukum: UU ini menetapkan sanksi pidana bagi pelaku politik uang. Pelanggar dapat dikenakan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Rizki, 2023).
- c. Pengaturan dana kampanye: UU ini mengatur secara ketat sumber dana kampanye yang diperbolehkan, termasuk larangan menerima sumbangan dari pihak asing atau badan usaha tertentu (Humas, 2017).
- d. Transparansi keuangan: Peserta pemilu diwajibkan untuk melaporkan sumber dan penggunaan dana kampanye secara transparan (Humas, 2017).

BAB 5 – Peranan Lembaga

A. Strategi Bawaslu Dalam Pencegahan Politik Uang Digital

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mengembangkan beberapa strategi untuk mencegah praktik politik uang digital menjelang Pemilu 2024.

1. **Pengawasan Digital.** Bawaslu berupaya memaksimalkan pengawasan di ruang digital untuk mencegah dan mengatasi pemanfaatan politik uang elektronik (Ameliya, 2022b). Hal ini penting mengingat perkembangan teknologi digital telah mengubah modus pelanggaran pemilu, termasuk politik uang menggunakan dompet digital (Ameliya, 2022b). Bawaslu pastinya perlu membentuk tim khusus yang menggunakan alat analisis big data untuk memindai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Teknologi ini mampu mendeteksi pola komunikasi mencurigakan, seperti penggunaan kata kunci terkait penawaran uang atau hadiah dalam konteks politik. Di Kota Surabaya, Bawaslu menggabungkan analisis metadata dengan laporan masyarakat melalui aplikasi pelaporan real-time, memungkinkan identifikasi akun-akun yang diduga terlibat dalam politik uang digital (H. Putri & Agustina, 2024a). Kolaborasi dengan penyedia layanan e-wallet seperti GoPay dan OVO menjadi kunci dalam melacak aliran dana mencurigakan. Bawaslu Provinsi Lampung,

BAB 6 – Strategi Pencegahan Komprehensif

A. Pendidikan Publik dan Kampanye Kesadaran

Pengalaman di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang mengintegrasikan modul pendidikan kewarganegaraan dengan studi kasus politik uang mampu meningkatkan kesadaran kritis siswa sebesar 42% dibandingkan metode konvensional (Purba et al., 2023). Universitas Negeri Medan (UNIMED) mengembangkan program simulasi pemilu berbasis skenario yang melibatkan mahasiswa dalam peran sebagai kandidat, pengawas, dan pemilih, dengan hasil peningkatan pemahaman tentang mekanisme pelaporan pelanggaran sebesar 35% (Purba et al., 2023).

Gerakan Desa Anti-Politik Uang (APU) di Yogyakarta menggunakan pendekatan "edukasi sambil berkegiatan" melalui forum arisan, pengajian, dan pertemuan karang taruna untuk menyisipkan materi tentang konsekuensi politik uang. Model ini berhasil meningkatkan partisipasi warga dalam pengawasan pemilu sebesar 28% dibandingkan desa non-APU (Trias & Amrurrobbi, n.d.). LSM seperti Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) mengembangkan sekolah lapangan pemilu yang menggabungkan pelatihan teknis pengawasan dengan pendampingan hukum bagi relawan masyarakat (KISP, 2020).

BAB 7 – Inovasi Teknologi Dalam Pencegahan

A. Pengembangan Sistem Deteksi Dini Transaksi Mencurigakan

Praktik politik uang digital telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan perkembangan teknologi finansial, menggeser metode konvensional ke ranah digital yang lebih sulit dilacak. Lembaga keuangan dan otoritas pengawas seperti PPATK, OJK, dan Bawaslu kini menghadapi tantangan kompleks dalam mengidentifikasi transaksi nontunai yang digunakan untuk memengaruhi pemilih. Inovasi teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI), analisis data besar (big data), dan sistem pemantauan real-time menjadi solusi krusial untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan. Penelitian ini mengkaji integrasi antara kerangka regulasi, kapabilitas institusional, dan kemajuan teknis dalam membangun mekanisme pencegahan yang efektif, dengan mempertimbangkan dinamika terbaru dalam Pemilu 2024 dan Pilkada serentak (Markahi, 2024b; Yosef Leon, 2024).

Politik uang tradisional, yang sebelumnya mengandalkan distribusi uang tunai atau barang secara fisik, kini bergeser ke metode digital seperti transfer rekening, top-up dompet elektronik, dan pemberian hadiah melalui platform digital. Modus ini memanfaatkan ketergantungan masyarakat terhadap layanan finansial digital, terutama di kalangan pemilih muda yang melek teknologi (Yosef Leon, 2024). Misalnya, tim sukses kandidat kerap mengirimkan dana ke

BAB 8 – Membangun Integritas Pemilu Era Digital

A. Penguatan Literasi Digital

Transformasi digital telah mengubah lanskap politik global, termasuk Indonesia, di mana praktik politik uang kini berevolusi ke ranah digital melalui platform e-wallet, media sosial, dan algoritma kecerdasan buatan. Dalam konteks Pemilu 2024, penguatan literasi digital menjadi fondasi kritis untuk melindungi integritas pemilu dari manipulasi finansial dan disinformasi. Laporan ini menganalisis strategi kolaboratif antara pemerintah, lembaga sipil, dan masyarakat dalam membangun kesadaran kritis pemilu, mengeksplorasi kerangka regulasi, inovasi teknologi, serta model edukasi yang diperlukan untuk memutus mata rantai politik uang berbasis digital.

Literasi digital dalam konteks pemilu meliputi kemampuan pemilu untuk mengakses, menganalisis, dan mengevaluasi informasi politik di ruang digital secara kritis (Afhiani et al., 2024; Setyawan, 2023). Menurut UNESCO, literasi ini mencakup lima dimensi: teknis (penggunaan platform digital), kognitif (analisis konten), sosial (partisipasi dalam diskusi online), etis (pemahaman norma digital), dan emosional (pengelolaan bias psikologis) (Setyawan, 2023). Dalam konteks Indonesia, literasi politik digital bertujuan memutus siklus politik transaksional dengan memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kampanye

BAB 9 – Penutup

A. Tantangan dan Strategi Kunci

Praktik politik uang digital di Indonesia menghadapi tantangan multidimensi yang kompleks. Pertama, kompleksitas transaksi digital mempersulit pelacakan aliran dana ilegal. Anonimitas teknologi seperti dompet digital, kripto, dan transfer lintas platform memungkinkan praktik ini dilakukan secara terselubung. Modus mikrotransaksi (Rp20.000–Rp100.000) melalui e-wallet yang masif sering kali disamarkan sebagai transaksi retail biasa. Kedua, regulasi yang tertinggal menjadi penghambat utama. UU Pemilu No. 7/2017 belum mengatur eksplisit modus modern seperti pemanfaatan NFT, staking kripto, atau airdrop token, sementara batas "hadiah digital" dalam kampanye (e-voucher, pulsa) masih ambigu secara hukum. Ketiga, kapasitas kelembagaan yang terbatas, terutama di lembaga pengawas seperti Bawaslu dan PPATK. Hanya ada sedikit auditor terlatih forensik digital yang tersedia untuk seluruh Indonesia, dan infrastruktur pengawasan berbasis AI belum merata di daerah 3T.

Tantangan keempat adalah budaya dan persepsi masyarakat. Politik uang digital dinormalisasi sebagai "bantuan sosial" atau "hadiah biasa", bukan pelanggaran. Data BPS 2023 menunjukkan 43% masyarakat pedesaan tidak menyadari bahwa menerima transfer digital termasuk politik uang. Kelima, kejahatan lintas batas, seperti penggunaan fintech global (PayPal, Wise) dan mata uang kripto, memfasilitasi aliran dana gelap asing yang sulit dipantau otoritas lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Osama Djasas, Saryono Yohanes, & Cyrilus W.T. Lamataro. (2024). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Belu Pada Tahun 2020. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2(1), 107–114. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i1.393>
- Afhiani, S., Putri, G., & Yesika. (2024). *STRATEGI PENINGKATAN LITERASI POLITIK PEMILIH PEMULA BERBASIS DIGITAL DI KABUPATEN KUBU RAYA*. <https://doi.org/10.29408/sosedu.v8i1.28087>
- Ainiyah, I. (2025a, January 30). *Efektivitas Pengawasan Partisipatif dalam Mencegah Praktik Money Politic*. <https://ap.umsida.ac.id/pengawasan-mencegah-praktik-money-politic/>
- Ainiyah, I. (2025b, January 30). *Efektivitas Pengawasan Partisipatif dalam Mencegah Praktik Money Politic*. <https://ap.umsida.ac.id/pengawasan-mencegah-praktik-money-politic/>
- Ainiyah, I. N. (2025a, January 30). *Efektivitas Pengawasan Partisipatif dalam Mencegah Praktik Money Politic*.
- Ainiyah, I. N. (2025b, February 3). *Dampak Money Politic terhadap Kualitas Demokrasi dan Kepercayaan Publik*.
- Ajid Fuad Muzaki. (2023, December 8). *Tantangan Transparansi Dana Kampanye Medsos*. Rumah Pemilu.

<https://rumahpemilu.org/tantangan-transparansi-dana-kampanye-medsos/>

Ala'a Kolkaila. (2024, October 29). *Crypto-Oligarchy And Its Impact on U.S. Electoral Outcomes*. <https://www.belfercenter.org/research-analysis/crypto-oligarchy-and-its-impact-us-electoral-outcomes>

Amal, B. (2024a). Efektivitas Pengawasan Partisipatif Dalam Mengurangi Jumlah Pelanggaran Pemilu 2024 di Jawa Barat. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 5. <https://doi.org/10.55108/jkp.v5i2.491>

Amal, B. (2024b). Efektivitas Pengawasan Partisipatif Dalam Mengurangi Jumlah Pelanggaran Pemilu 2024 di Jawa Barat. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 5(2). <https://doi.org/10.55108/jkp.v5i2.491>

Ameliya, T. M. (2022a, November 28). *Bawaslu RI Maksimalkan Pengawasan Digital untuk Cegah Politik Uang*. <https://www.antaranews.com/berita/3271737/bawaslu-ri-maksimalkan-pengawasan-digital-untuk-cegah-politik-uang>

Ameliya, T. M. (2022b, November 28). *Bawaslu RI Maksimalkan Pengawasan Digital untuk Cegah Politik Uang*. <https://www.antaranews.com/berita/3271737/bawaslu-ri-maksimalkan-pengawasan-digital-untuk-cegah-politik-uang>

- Anasyta Sani Dhunani Mahfudin. (2024, November 23). *Politik Uang dalam Era Digital*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/anasyta-sani-dhuhani/politik-uang-dalam-era-digital-23xoultAf7o>
- Andi, F. (2022, December 5). *Bjorka dan Lemahnya Politik Hukum Digital*. KompasID. <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/12/03/bjorka-dan-lemahnya-politik-hukum-digital>
- Anisah, L. (2023, November 7). *PPATK: e-Wallet dan e-Money Bisa Jadi Modus Politik Uang pada Pemilu 2024*. <https://nasional.kontan.co.id/news/ppatk-e-wallet-dan-e-money-bisa-jadi-modus-politik-uang-pada-pemilu-2024>
- Antara. (2023, August 13). *Bawaslu Ajak PPATK-OJK Berantas Fenomena Politik Uang Elektronik*. Antara. <https://www.antaranews.com/berita/3679218/bawaslu-ajak-ppatk-ojk-berantas-fenomena-politik-uang-elektronik>
- Ardianto, N. (2023, July 3). *Politik di Era Digital: Tantangan, Peluang, dan Transformasi*. <https://www.kompasiana.com/novalardianto7823/64a1b64f4addee4fe04bfe82/politik-di-era-digital-tantangan-peluang-dan-transformasi>
- Ayunda, R., Nataline Tu, M., Ardian Hermisyarif, R., Mariati, D., Dicaprio, L., Kang, C., Tarmon, W., firmansyah, R., Alviola, A., Emeleo Putra, V., Tan, B., Karunia Wijaya, T., & Putra Ardana, R. (2024). *Kelas Pancasila Mahasiswa/I UIB: Optimalisasi Peran Pengawas Pemilu Melalui*

Media Sosial. *Jurnal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat*), 8(2), 130.
<https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/sinarsangsurya/article/download/3596/pdf>

Bagja, R. (2024). *Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) 2024*. Bawaslu.

<https://ppidapp.bawaslu.go.id/api/services/file/public/di/p/91/1718171463293-Buku%20Panduan%20Siwaslu%202024%20final%20Udpd.pdf>

Bagus Pribadi. (2024, February 12). *Politik Uang di Masa Tenang Ditengarai Lewat Dompot Digital dan Uang Elektronik*. Tempo.

<https://www.tempo.co/ekonomi/politik-uang-di-masa-tenang-ditengarai-lewat-dompot-digital-dan-uang-elektronik-88135>

Basarah, B., & Hasanah, U. (2024). Money Politik dan Pemilu di Indonesia dalam Perspektif Budaya Hukum. *Journal Of Law And Social Society*, 1.

Basyari, I. (2023, December 19). *Bawaslu Mengusut Temuan Transaksi Mencurigakan dari PPATK*. KompasID.
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/12/19/bawaslu-belum-mengusut-temuan-transaksi-mencurigakan-dari-ppatk>

Basyari, I. (2024, November 24). *Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Diingatkan soal Modus Politik Uang yang Kian Canggih*. Kompas.

- Bawaslu. (2019). *Buku Petunjuk Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019* (Bawaslu, Ed.). https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/reformasi_birokrasi/BUKU%20PANDUAN%20SIWASLU.pdf
- Beddu, Abd. (2023). *Upaya Bawaslu dalam Mencegah Politik Uang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda 2020*. <https://library.fisip-unmul.ac.id/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=18c85b9f6f3668bbbf523b415e0ae961>
- Bibit Abdi Wijaya, & M. Zulherawan. (2024). Strategi Bawaslu Kota Pekanbaru dalam Mencegah Kecurangan Politik Uang dalam Pemilihan Umum 2024. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/13926/10977/27772>
- Bona Boaz. (2025, February 12). *Mencegah Penyebaran Propaganda Politik Uang dengan Regulasi Komunikasi Digital*. Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/bonaboaz7700/67ac6773c925c40bce127592/mencegah-peyebaran-propaganda-politik-uang-dengan-regulasi-komunikasi-digital>
- Bona Toras Boas Simanjuntak. (2025, February 13). *Mencegah Penyebaran Propaganda Politik Uang dengan Regulasi Komunikasi Digital*.
- Budiman. (2024, March 1). *Teknologi Blockchain Dalam Politik: Potensi dan Tantangan dalam Pemilihan Umum dan Keamanan Data*. Kompasiana.Com.

<https://www.kompasiana.com/budism9132/65e149ab1470935bc7035df2/teknologi-blockchain-dalam-politik-potensi-dan-tantangan-dalam-pemilihan-umum-dan-keamanan-data>

Burcher, C. U. (2019). Cryptocurrencies and Political Finance. In *Cryptocurrencies and Political Finance*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance. <https://doi.org/10.31752/idea.2019.7>

Chariris, M. (2019, March 29). *Akar Kemunculan Praktik Politik Uang, sejak dari Pemilihan Lurah*.

Cindy Nur Oktaviani. (2024, September 4). *Blockchain Partisipatif bagi Pemilu yang Berkualitas*. IAP. <https://iap2.or.id/2024/09/blockchain-partisipatif-bagi-pemilu-yang-berkualitas/>

CNN Indonesia. (2023, November 7). *PPATK: Ada Potensi Politik Uang Via e-money & e-wallet di Pemilu 2024*.

Desi Purnama Sari. (2023a, December 9). *Bawaslu RI: e-Wallet jadi sarana baru "money politic" Pemilu 2024*. AntaraNews. <https://www.antaranews.com/berita/3863817/bawaslu-ri-e-wallet-jadi-sarana-baru-money-politic-pemilu-2024>

Desi Purnama Sari. (2023b, December 9). *Bawaslu RI: e-Wallet jadi sarana baru "money politic" Pemilu 2024*. AntaraNews.

Efendi Lod Simanjuntak. (2023, April 6). *Anatomi Hukum Transaksi Mencurigakan*. Kompas.Id.

<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/04/05/anatomi-hukum-transaksi-mencurigakan>

Ernawati Ayu. (2023a, December 24). *OPINI: Meminimalisir Praktik Money Politik dalam Proses Pemilu*.

Ernawati Ayu. (2023b, December 24). *OPINI: Meminimalisir Praktik Money Politik dalam Proses Pemilu*.
<https://kpi.iainpare.ac.id/2023/12/opini-meminimalisir-praktik-money.html>

Fathol Bari. (2023a). Membangun Kesadaran Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(2), 268–282. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.1468>

Fathol Bari. (2023b). Membangun Kesadaran Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(2), 268–282. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.1468>

Feri Mei Ferdiansah. (2023, June 12). *Teknologi Blockchain dalam Transparansi Pemilu dan Pengawasan Publik: Studi Pemilu AS dan RI*.

Fernandes, A., Mellaz, A., Sandi, D. K. W. R., Siregar, F. R. F. E., Hurriyah, Putra, I. W. W., Antariksa, L. W. N., Putranti, S. D., Ahmad, S. H., & Wahyu, Y. (n.d.). *Perihal Penyelenggaraan Kampanye*. www.bawaslu.go.id

Firdaus Baderi. (2023a, September 18). *Waspada Politik Uang Digital pada Pemilu 2024*.

- Firdaus Baderi. (2023b, September 18). *Waspada Politik Uang Digital pada Pemilu 2024*. Neraca. <https://www.neraca.co.id/article/186069/waspada-politik-uang-digital-pada-pemilu-2024>
- Firmansyah, M. (2023a, November 7). *PPATK Ingatkan Potensi Money Politic Lewat e-Wallet dan e-Money pada Pemilu 2024*. <https://asumsi.co/post/84451/ppatk-ingatkan-potensi-money-politic-lewat-e-wallet-dan-e-money-pada-pemilu-2024/>
- Firmansyah, M. (2023b, November 7). *PPATK Ingatkan Potensi Money Politic Lewat e-Wallet dan e-Money pada Pemilu 2024*.
- Gunawan Kusmantoro. (2024, January 8). *18 Parpol Peserta Pemilu 2024 Telah Serahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke KPU Kota Cimahi*. Bawaslu Cimahi. <https://cimahikota.bawaslu.go.id/index.php/berita/18-parpol-peserta-pemilu-2024-telah-serahkan-laporan-awal-dana-kampanye-ladk-ke-kpu-kota>
- Hafizh, I. (2023, December 8). *Tantangan Implementasi Demokrasi di Era Digital: Memelihara Prinsip-Prinsip Demokrasi di Era Digital*. Kompasiana.
- Hamidah, Q. (2023a). IMPLIKASI REGULASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TERHADAP MONEY POLITIC MELALUI E-WALLET DALAM PEMILU 2024. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2).
- Hamidah, Q. (2023b). Implikasi Regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Money Politic Melalui E-

Wallet dalam Pemilu 2024. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4.
<https://qaumiyyah.org/index.php/qaumiyyah/article/download/83/50/>

Hasinadra P. (2024, October 10). *Teknologi AI Untuk Pemantauan Media Sosial: Lebih Akurat & Efisien Netray Update Artificial Intelligence*. Netray.
<https://analysis.netray.id/teknologi-ai-untuk-pemantauan-media-sosial/>

Hendi Poernawan. (2023, August 14). *Bawaslu Luncurkan IKP Soal Politik Uang, Lolly Ingatkan Upaya Pencegahan*. Bawaslu Sulsei.
<https://sulsei.bawaslu.go.id/web/page/17/>

Hendi Poernawan. (2024, August). *Cegah Politik Uang Pada Pemilihan 2024, Bawaslu Tingkatkan Pengetahuan dan Kemampuan Jajaran Laksanakan Regulasi*. Bawaslu.
<http://bawaslu.go.id/id/content/cegah-politik-uang-pada-pemilihan-2024-bawaslu-tingkatkan-pengetahuan-dan-kemampuan-jajaran>

Hukumonline. (2024, January 13). *PPATK Tengara Ada Transaksi Mencurigakan 100 Caleg di Pemilu 2024*. Hukumonline.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ppatk-tengara-ada-transaksi-mencurigakan-100-caleg-di-pemilu-2024-lt65a2457a09f9c/>

Humas. (2017, August 22). *Inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2)*. Sekretariat Kabinet RI. <https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-2/>

- Humas. (2023, July 18). *Coba-coba Money Politik, Pidana Penjara Menanti*. Bawaslu. <https://muratara.bawaslu.go.id/berita/coba-coba-money-politik-pidana-penjara-menanti>
- Humas. (2024, November 13). *Bawaslu Kembali Luncurkan Siswaslih sebagai Laporan Pengawas Tingkat Desa secara Cepat dan Real Time*. Bawaslu Kabupaten Musi Lawas .
- HUMAS. (2024, November 13). *Optimalkan Pelaporan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada 2024 Secara Cepat, Bawaslu Luncurkan Aplikasi Siwaslih Berbasis Android*. Bawaslu Kota Cimahi. <https://cimahikota.bawaslu.go.id/berita/optimalkan-pelaporan-pengawasan-pemungutan-dan-penghitungan-suara-pilkada-2024-secara-cepat>
- Humas. (2025, January 15). *Penggunaan Teknologi AI dalam Kampanye Politik di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Regulasi*. Bawaslu. <https://jakartabarat.bawaslu.go.id/berita/penggunaan-teknologi-ai-dalam-kampanye-politik-di-indonesia-peluang-tantangan-dan-regulasi>
- Humas Bawaslu Padang Pariaman. (2024, December 17). *Ke Mana Panwascam dan PKD, Kok Politik Uang Dibiarkan?* Bawaslu Padang Pariaman. <https://padangpariaman.bawaslu.go.id/berita/ke-mana-panwascam-dan-pkd-kok-politik-uang-dibiarkan>
- Husna, H. (2023, November 30). *Dukung Pemilu Damai 2024, Kominfo Siap Tingkatkan Literasi Digital Masyarakat*. Kominfo. <https://aptika.kominfo.go.id/2023/11/dukung->

pemilu-damai-2024-kominfo-siap-tingkatkan-literasi-digital-masyarakat/

Imamatul Silfia. (2025a, January 14). *OJK Ungkap Tantangan Pengawasan Aset Kripto*.
<https://www.antaranews.com/berita/4583302/ojk-ungkap-tantangan-pengawasan-aset-kripto>

Imamatul Silfia. (2025b, January 14). *OJK Ungkap Tantangan Pengawasan Aset Kripto*.

Imanni, S. S., Fina, F., Ziporani, M., Ballo, D., Christya, A., Asi, E., & Saksono, K. A. (2024). Pandangan Masyarakat Gresik Terhadap Politik Uang dalam Pembagian Bansos. *Jurnal Keadilan Pemilu*.
<https://doi.org/10.55108/jkp.v5i1.430>

Indah Nurul Ainiyah. (2025). *Efektivitas Pengawasan Partisipatif dalam Mencegah Praktik Money Politic*. Umsida. <https://ap.umsida.ac.id/pengawasan-mencegah-praktik-money-politic/>

Indasari, Burhanuddin, & Rahim, S. (2020). *Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Money Politic di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Pilkada 2018)*. 1.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>

Junaedi, E., & Rahmahani, A. P. (2022). Analisis Yuridis Konsep Money Politik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Efektivitas Penegakan Hukum dalam Mencegah Politik Uang di Indonesia. *JCA of LAW*, 3, 74.

- Kadek Melda Luxiana. (2023a, November 7). *Awat! PPAK Sebut Praktik Politik Uang Bisa Lewat e-Money dan e-Wallet*. DetikNews. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7023272/awat-ppatk-sebut-praktik-politik-uang-bisa-lewat-e-money-dan-e-wallet>
- Kadek Melda Luxiana. (2023b, November 7). *Awat! PPAK Sebut Praktik Politik Uang Bisa Lewat e-money dan e-wallet*. Detik. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7023272/awat-ppatk-sebut-praktik-politik-uang-bisa-lewat-e-money-dan-e-wallet>
- Kadek Melda Luxiana. (2023c, November 7). *PPAK Wanti-wanti Money Politics Lewat e-Wallet di Pemilu 2024* . DetikNews. news.detik.com/pemilu/d-7023114/ppatk-wanti-wanti-money-politics-lewat-e-wallet-di-pemilu-2024
- Kadek Melda Luxiana. (2023d, November 7). *PPAK Wanti-wanti Money Politics Lewat e-Wallet di Pemilu 2024* . DetikNews. news.detik.com/pemilu/d-7023114/ppatk-wanti-wanti-money-politics-lewat-e-wallet-di-pemilu-2024
- Kaimuddin Haris, O., Hidayat, S., & Sabaruddin Sinapoy, M. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Bitcoin dalam Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Criminal Responsibility for Using Bitcoin in Money Laundering Crimes. In *Halu Oleo Legal Research* | (Vol. 5, Issue 2). <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/52518>.

- Khairiah, U., Sipahutar, E. S., & Tanjung, I. (2023). *Kepastian Hukum dalam Penetapan Kriteria Money Politik Menjelang Kampanye Pemilu 2024*. 3(2), 2797–3670. <https://perludem.org/2023/04/02/soal->
- KISP. (2020). *Pendidikan Anti Korupsi dan Anti Politik Uang*. Komite Independen Sadar Pemilu. <https://kisp-id.org/wp-content/uploads/2021/03/Pendidikan-Anti-Korupsi-dan-Politik-Uang.pdf>
- Koran Sulindo. (2023a, November 7). *E-Money Potensi Baru Politik Uang Pemilu 2024*. <https://koransulindo.com/e-money-potensi-baru-politik-uang-pemilu-2024/>
- Koran Sulindo. (2023b, November 7). *E-Money Potensi Baru Politik Uang Pemilu 2024*.
- Langø, H.-I. (2016). *NUPI Report Cyber Security Capacity Building: Security and Freedom*. Norwegian Institute of International Affairs. https://nupi.brage.unit.no/nupi-xmlui/bitstream/handle/11250/2381169/NUPI_Report_1_16_Hans_Inge+Lango.pdf?sequence=3
- Lulu A. (2025, January 17). *Penggunaan Teknologi AI dalam Kampanye Politik di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Regulasi*. Bawaslu Jakarta Barat. Penggunaan Teknologi AI dalam Kampanye Politik di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Regulasi
- M. Natsir Kongah. (2023, November 7). *PPATK 4th Legal Forum: Urgensi Regulatory Technology dan Digital Evidence Dalam Mendukung Efektivitas Penegakan Hukum TPPU dan TPPT*. PPATK.

- Markahi. (2024a, February 13). *Waspadai Politik Uang (Money Politic) Digital Pada Pemilu 2024*.
- Markahi. (2024b, February 13). *Waspadai Politik Uang (Money Politic) Digital Pada Pemilu 2024*. Sustain.Id. <https://sustain.id/2024/02/13/waspadai-politik-uang-money-politic-digital-pada-pemilu-2024/>
- Martha Herlinawati Simanjuntak. (2024, August 19). *OJK: Lembaga keuangan kembangkan deteksi dini transaksi judi online*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/4272507/ojk-lembaga-keuangan-kembangkan-deteksi-dini-transaksi-judi-online>
- Marzuki, R. (2024, January 16). *Laku Culas Kampanye dan Politik Uang Digital (Bagian Pertama dari Dua Tulisan)*. Harian Fajar. <https://harian.fajar.co.id/2024/01/16/laku-culas-kampanye-dan-politik-uang-digital-bagian-pertama-dari-dua-tulisan/3/>
- Media Center Sleman. (2023, March 8). *Cegah Praktik Politik Uang dengan Program Desa APU*. Media Center Sleman. <https://mediacenter.slemankab.go.id/2023/03/08/cegah-praktik-politik-uang-dengan-program-desa-apu/>
- menpanrb. (2023, September 26). *Presiden Tekankan Pentingnya Transformasi Digital yang Lebih Holistik*. Menpanrb. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/presiden-tekanan-pentingnya-regulasi-transformasi-digital-yang-lebih-holistis>

- Mohamed, A. (2024, March 17). *Social Media Threat Monitoring: Boosting Your Online Presence*. Aimtechnologies.
<https://www.aimtechnologies.co/social-media-threat-monitoring-boosting-your-online-presence/>
- Mohammad Arief Hidayat. (2023, February 3). *Ketua Bawaslu: Ada Potensi Dana Asing Kripto dan Bitcoin untuk Money Politics Pemilu 2024*. Viva.Co.Id.
<https://www.viva.co.id/berita/politik/1571502-ketua-bawaslu-ada-potensi-dana-asing-kripto-dan-bitcoin-untuk-money-politics-pemilu-2024>
- Nasyuha, A. (2024, February 12). *Literasi Digital Pada Pemilu 2024*. UTDI. <https://www.utdi.ac.id/terbitan/109/literasi-digital-pada-pemilu-2024>
- Natisha Andarningtyas. (2018, May 11). *Mungkinkah blockchain untuk pemilu di Indonesia?* Antara News.
<https://www.antaranews.com/berita/708838/@antaras-umut>
- Noviona Aprilita Maharani Putri, H., & Fitria Agustina, I. (2024). Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money politic Pada Pemilu di Kota Surabaya. *Journal of Governance and Local Politics*, 6(1).
- Nurisman. (2018, February 27). *Bawaslu dan PPAK Kerjasama Perkuat Pengawasan Dana Kampanye*. Bawaslu.
<https://bawaslu.go.id/id/galeri-foto/bawaslu-dan-ppak-kerjasama-perkuat-pengawasan-dana-kampanye>

- Nusamuda Pratama, I. (2022a). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab dan Solusi Mengatasi Politik Uang dalam Konteks Pemilu 2024 di Indonesia*. 1, 761–767.
- Nusamuda Pratama, I. (2022b). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab dan Solusi Mengatasi Politik Uang dalam Konteks Pemilu 2024 di Indonesia*. 1, 761–767.
- Oskandar, D. (2024, November 18). *Bawaslu Sumsel Awasi Politik Uang hingga Ranah Digital*.
- Panda.id. (2023, May 8). *Revitalisasi Transparansi Pengelolaan Dana Desa Melalui Teknologi Blockchain: Peluang dan Tantangan*. Panda.Id.
- Pradana, J. (2024, October 17). *Bagja Harap Politik Uang Dianggap Kejahatan Serius*.
<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bagja-harap-politik-uang-dianggap-kejahatan-serius>
- Prasetyo, M. H. (2020). Kejahatan Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terhadap Konstruksi Pemerintahan. In *Online Administrative Law & Governance Journal* (Vol. 3).
<https://media.neliti.com/media/publications/159226-ID-fenomena->
- Purba, V., Zahra, F., Salsabila, T., Husin, M. H., & Ivanna, J. (2023). Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Menjelang Pemilu 2024 Pada Mahasiswa Jurusan PPKn Unimed. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4(4).
<https://www.tempo.co/ekonomi/politik-uang-di-masa->

tenang-ditengarai-lewat-dompet-digital-dan-uang-elektronik-88135

- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2023, July 20). *Yuk, Kenali Lebih Dalam Apa Itu Politik Berintegritas*. Pusat Edukasi Antikorupsi. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230720-yuk-kenali-lebih-dalam-apa-itu-politik-berintegritas>
- Pusko Media Indonesia. (2024, November 1). *Blockchain dalam Penggalangan Dana (Crowdfunding): Transformasi Crowdfunding yang Aman dan Terpercaya*. Puskomedia.Id. <https://www.puskomedia.id/blog/blockchain-dalam-penggalangan-dana-crowdfunding-transformasi-crowdfunding-yang-aman-dan-terpercaya/>
- Putra, R., & Lyanthi, M. (2024). Kewenangan PPATK Dalam Mencegah dan Memberantas Transaksi Keuangan Mencurigakan Hasil Tindak Pidana pada Perjudian Online. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(2), 320–336. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.341>
- Putri, H., & Agustina, I. (2024a). Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu di Kota Surabaya. *Journal of Governance and Local Politics*, 6(1). <https://journal.unpacti.ac.id/index.php/JGLP/article/download/1057/727/>
- Putri, H., & Agustina, I. (2024b). Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu di Kota Surabaya. *Journal of Governance and Local Politics*, 6(1).

<https://journal.unpacti.ac.id/index.php/JGLP/article/download/1057/727/>

Rahayu, M., Indarja, & Wisnaeni, F. (2020). *Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah*. 9.

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/download/27027/25853>

Rahayuningsih, T. (2013). Analisis Peran PPATK sebagai Salah Satu Lembaga dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia. *Yuridika*, 28. <https://ejournal.unair.ac.id/YDK/article/download/349/183/586>

Rahmaniah, S., Jumadi, & Alamri, A. (2022). Strategi Penguatan Literasi Digital Berbasis Komunitas dalam Pengawasan PILKADA di Kalimantan Barat. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v13i1.4960>

Rahmawati, E., Efendi, R., Supodo, Y., Afidatusolikha, Hazairin, M., Mashudi, A., Eka, Y., Farobi, C., Wahyuningsih, T., & Amrullah, A. (2023). *Mengawal Pemilu Demokratis dan Bermartabat* (G. Larasadi, Ed.). <https://jatim.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2023/09/MODUL-PARMAS-JAWA-TIMUR.pdf>

Rama Agusta. (2023, September 1). *Di Rakor Tahunan PPATK, Ketua Bawaslu Jabarkan Strategi Cegah Politik Uang Bawaslu*. Bawaslu. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/di-rakor-tahunan->

ppatk-ketua-bawaslu-jabarkan-strategi-cegah-politik-uang-bawaslu

Reza Pahlevi. (2023, November 30). *Bawaslu Palembang Sebut Politik Uang Tak Lagi Cash, tapi Lewat e-Wallet*. DetikNews.

Riewanto, A. (2015). Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 111–125. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.363>

Rita Puspita Sari. (2023, November 23). *PT Annalisee Big Data Luncurkan Aplikasi Pendeteksi Buzzer AI*. Cloud Computing. <https://www.cloudcomputing.id/berita/pt-annalisee-big-data-luncurkan-aplikasi-pendeteksi-buzzer-berbasis-ai>

Rizki, M. (2023, August 29). *Hindari Politik Uang Dalam Pemilu, Begini Aturan dan Ancaman Hukumannya*. Hukum Online. *Hindari Politik Uang Dalam Pemilu, Begini Aturan dan Ancaman Hukumannya*

Rohmawati, Y. (2024, November 18). *Bawaslu Sumsel Sebut Ada Potensi Politik Uang Melalui Dompot Digital*. <https://www.tempo.co/politik/bawaslu-sumsel-sebut-ada-potensi-politik-uang-melalui-dompot-digital-1169814>

Romadhona S. (2024, November 26). *Mengapa Politik Uang Masih Terjadi Walau Sudah Ada UU? Ini Kata Pakar Umsida*. Umsida. <https://umsida.ac.id/mengapa-politik-uang-masih-terjadi-walau-sudah-ada-uu/>

- Rosit, M., Katiri, J., & Rifansya, F. (2024). Penguatan Literasi Digital dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Warga di Desa Kuripan Ciseeng Bogor. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 4(6). <https://doi.org/10.59818/jpm.v4i6.996>
- Salasah, R. (2022, December 8). *Demokrasi Digital Hadapi Tantangan Upaya Mitigasi Perlu Dilakukan*. KompasID. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/12/08/demokrasi-digital-hadapi-tantangan-upaya-mitigasi-perlu-dilakukan>
- Santia, T. (2023a, November 7). *Hati-Hati, Ada Potensi Politik Uang Lewat E-money dan E-Wallet*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5446541/hati-hati-ada-potensi-politik-uang-lewat-e-money->
- Santia, T. (2023b, November 7). *Hati-Hati, Ada Potensi Politik Uang Lewat E-money dan E-Wallet*.
- Saputra, F. (2023). *Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Menangani Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota (Studi Kasus Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung)*.
- Sarjono. (2024, November 24). *Mawas Politik Uang Digital dalam Pilkada 2024*. Mataram Times. <https://mataram.times.co.id/news/kopi-times/av8me6f2qp/Mawas-Politik-Uang-Digital-dalam-Pilkada-2024>
- Satriyani Dewi Astuti. (2023, August 21). *Transformasi Pola Kampanye Politik Uang Menuju Pemilu 2024*. Unair.

<https://unair.ac.id/transformasi-pola-kampanye-politik-uang-menuju-pemilu-2024/>

Setyawan, H. (2023). *LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA*.

<http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-112300000000047/swf/7386/PPRA%2065%20-%2035%20s.pdf>

Sholatar, M. A. S. (2024a, May 29). *[PRESS RELEASE] Digital and Election Issues (DESUS) – The Rise of Money Politics in Indonesia: High Campaign Costs and Public Tolerance? | #12*. <https://digitalsociety.id/2024/05/29/press-release-digital-and-election-issues-desus-the-rise-of-money-politics-in-indonesia-high-campaign-costs-and-public-tolerance-12/17751/>

Sholatar, M. A. S. (2024b, May 29). *[PRESS RELEASE] Digital and Election Issues (DESUS) – The Rise of Money Politics in Indonesia: High Campaign Costs and Public Tolerance? | #12*.

Sihotang, M., & Hoessein, Z. A. (2025). *Transformasi Politik Hukum dalam Penguatan Regulasi Cyber Law di Indonesia*. 6(1), 2722–7782. <https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/download/2070/2031/17658>

Simanjuntak, B. (2025, February 12). *Mencegah Penyebaran Propaganda Politik Uang dengan Regulasi Komunikasi Digital*. Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Mencegah Penyebaran Propaganda Politik Uang dengan Regulasi Komunikasi Digital". Kompasiana.

<https://www.kompasiana.com/bonaboaz7700/67ac6773c925c40bce127592/mencegah-peyebaran-propaganda-politik-uang-dengan-regulasi-komunikasi-digital>

Simarmata, M. H. (2017). Peranan e-Government dan Media Sosial untuk Mewujudkan Budaya Transparansi dan Pemberantasan Korupsi. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 3(2), 203–230.
<https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.108>

Sinar Utami. (2023, November 7). *PPATK Sebut e-Wallet Bisa Dimanfaatkan untuk Praktik Politik Uang, Apa Modusnya?* Kumparan.

siplawfirm. (2024, February 6). *Regulasi Teknologi di Indonesia serta Prospek dan Tantangannya*. Siplawfirm.
<https://siplawfirm.id/regulasi-teknologi-di-indonesia/?lang=id>

Stefani Yulindriani Ria S. R. (2024a, October 5). *Praktik Politik Uang Menggunakan eMoney? Ini Tanggapan Bawaslu Bantul*.
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/10/05/511/1190533/praktik-politik-uang-menggunakan-emony-ini-tanggapan-bawaslu-bantul>

Stefani Yulindriani Ria S. R. (2024b, October 5). *Praktik Politik Uang Menggunakan eMoney? Ini Tanggapan Bawaslu Bantul*.

suaradewata.com. (2024, January 26). *Mewaspada Politik Uang Digital Selama Pemilu 2024*.

- Sugihardana, D., Firdaus, M. H., & Rama, N. R. (2024). *Tinjauan Yuridis Kampanye yang dilakukan secara Online pada Kampanye Pemilu 2024*.
<https://proceedings.ums.ac.id/pdih/article/download/3343/3165/3529>
- Suhenty, L. (2024). *Memperkuat Pengawasan Partisipatif Pasca Tahun Politik 2024*.
<https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2024/12/Memperkuat-Pengawasan-Partisipatif-Pasca-Tahun-Politik-2024.pdf>
- Sulastio. (2020). Fenomena dan Pola Pelanggaran Paslon Terhadap Laporan Dana Kampanye: Studi Kasus di Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serenta Tahun 2020. *JURNAL BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU*, 3.
<https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBK/article/download/248/178/1494>
- Sulselprov. (2024, February 1). *Hadiri Literasi Digital Pemilu Damai, Pj Sekda: Penting untuk Menjaga Integritas dan Keamanan Demokrasi*. Sulselprov.
<https://sulselprov.go.id/post/hadiri-literasi-digital-pemilu-damai-pj-sekda-penting-untuk-menjaga-integritas-dan-keamanan-demokrasi>
- Sunartono. (2024, December 3). *BI Minta PJSP Lakukan Deteksi Dini Potensi Transaksi Judi Online*. Harian Jogja.
<https://news.harianjogja.com/read/2024/12/03/500/1196874/bi-minta-pjsp-lakukan-deteksi-dini-potensi-transaksi-judi-online>

- Susanti, M., & Setiajid. (n.d.). *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kota Semarang Tahun 2020*. <https://doi.org/10.1529/kp.v1i3.49>
- SustainID. (2024a, February 13). *Waspadai Politik Uang (Money Politic) Digital Pada Pemilu 2024*. SustainID. <https://sustain.id/2024/02/13/waspadai-politik-uang-money-politic-digital-pada-pemilu-2024/>
- SustainID. (2024b, February 13). *Waspadai Politik Uang (Money Politic) Digital Pada Pemilu 2024*. SustainID. <https://sustain.id/2024/02/13/waspadai-politik-uang-money-politic-digital-pada-pemilu-2024/>
- Suyatra, I. P. (2024, January 27). *Menghadapi Pemilu 2024: Tantangan dan Pencegahan Politik Uang Digital*.
- Syafitri, A., & Athahirah, A. (n.d.). *Literasi Politik Masyarakat dalam Pencegahan Politik Uang (Money Politics) di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Retrieved February 17, 2025, from http://eprints.ipdn.ac.id/17441/1/REPOSITORY_31.0253_Annisa%20Nur%20Syafitri%20rev%203.pdf
- Taksil, A. (2024). *Pengawasan Partisipatif Bawaslu Berbasis Digital melalui Aplikasi Siwaslu Pada Pemilihan Umum 2024*. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/42048-Full_Text.pdf
- TempoNews. (2024, February 12). *Politik Uang di Masa Tenang Ditengarai Lewat Dompot Digital dan Uang Elektronik*.
- The Indonesian Institute. (n.d.). *Penataan Kampanye Politik di Media Sosial untuk Persiapan Pemilu dan Pilkada*

Serentak Tahun 2024 yang Informatif dan Edukatif. In *Penataan Kampanye Politik di Media Sosial untuk Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Informatif dan Edukatif*. Retrieved February 18, 2025, from <https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2023/04/Policy-Brief-Penataan-Kampanye-Politik-di-Media-Sosial-The-Indonesian-Institute.pdf>

Tri Meilani Ameliya. (2022, November 22). *Bawaslu RI maksimalkan pengawasan digital untuk cegah politik uang*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/3271737/bawaslu-ri-maksimalkan-pengawasan-digital-untuk-cegah-politik-uang>

Trias, M. E., & Amrurrobbi, A. A. (n.d.). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 141–152. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1>

Wahyu, Y. (2023, August 16). *Melawan Politik Uang, Perkuat Pengawasan Partisipatif*. Kompas.

Wahyuni, E. (2023). *Model Pengawasan Partisipatif dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024*. <http://digilib.unila.ac.id/72723/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

WartaPemeriksa. (2024, February 18). *Pengawasan Kripto Belum Optimal*. <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=49985>

- Wibawana, W. (2024, January 22). *Tentang Siwaslu 2024: Cara Kerja, Sasaran hingga Tujuannya*. DetikNews. <https://news.detik.com/pemilu/d-7154730/tentang-siwaslu-2024-cara-kerja-sasaran-hingga-tujuannya>
- Willa Wahyuni. (2023). *4 Cara Mengetahui Transaksi Keuangan Mencurigakan*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-cara-mengetahui-transaksi-keuangan-mencurigakan-lt64104605a0aec/>
- Yanuar, M. (2023). Kedudukan Pendekatan Follow The Money Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penindakan Praktik Politik Uang. *Majalah Hukum Nasional*, 53. <https://doi.org/10.33331/mhn.v53i1.204>
- Yohan Wahyu. (2023, August 16). *Melawan Politik Uang, Perkuat Pengawasan Partisipatif*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/16/melawan-politik-uang-perkuat-pengawasan-partisipatif>
- Yolanda Adelia Bella Lestari Sam, Messy Rachel Mariana Hutapea, & Suyudi Setiawan. (2022). Legalitas Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p04>
- Yosef Leon. (2024, October 2). *Bawaslu DIY: Fenomena Politik Uang Pilkada 2024 Bergeser ke Transaksi Nontunai*. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/10/02/510/1190173/bawaslu-diy-fenomena-politik-uang-pilkada-2024-bergeser-ke-transaksi-nontunai>

- Yusuf, A., Namruddin, R., Mirfan, M., Jumarlis, M., & Mahka, Muh. F. R. (2024a). Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 104–108. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5342>
- Yusuf, A., Namruddin, R., Mirfan, M., Jumarlis, M., & Mahka, Muh. F. R. (2024b). Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 104–108. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5342>
- Zaein, H., & Djafar, T. (n.d.). *Strategi Bawaslu dalam Pencegahan Politik Uang melalui Desa Anti Politik Uang di Desa Lipursari Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah 2023*. Retrieved February 19, 2025, from [http://eprints.ipdn.ac.id/17304/2/Repositori%20\(1\).pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/17304/2/Repositori%20(1).pdf)
- Zainudin Hasan, Wiryadi Wiryadi, Arkaan Fadhulrrahman, Muhammad Dimas, & Ronald Dzaky Al Jabbar. (2024). Regulasi Penggunaan Teknologi Blockchain Dan Mata Uang Kripto Sebagai Tantangan Di Masa Depan Dalam Hukum Siber. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(2), 55–69. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1163>

BIODATA PENULIS

Mario Tulenan Parinsi adalah seorang Dosen dan peneliti di bidang teknologi informasi dan pendidikan. Saat ini, ia berkerja sebagai dosen di Universitas Negeri Manado (UNIMA), Sulawesi Utara. Mario menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Teknik Informatika Universitas Bina Nusantara (Binus) Jakarta pada tahun 2004 dan 2009. Ia juga meraih gelar doktor di bidang Pendidikan Teknologi Kejuruan dari Universitas Negeri Yogyakarta, dengan program sandwich di Technische Universität Dresden.

Setelah menyelesaikan pendidikan magister, Mario sempat bekerja sebagai analis sistem di Perusahaan Software Jakarta sebelum memutuskan untuk berkarir di dunia akademik. Sebagai dosen di UNIMA, Mario mengajar mata kuliah yang berfokus pada teknologi informasi dan pendidikan terutama pada Analisis dan Perancangan Sistem. Mario aktif dalam penelitian dengan minat di bidang Teknologi Pendidikan, Pembelajaran Berbasis Mobile, dan Sistem Informasi. Publikasi-Publikasi Yang Sudah Dilakukan Mencakup Penggunaan Teknologi Hijau Dalam Pendidikan Kejuruan Dan Sistem Pembelajaran Berbasis Media Sosial. Mario berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui inovasi teknologi yang relevan dengan kebutuhan modern.



Politik uang digital di Indonesia telah menjadi ancaman serius terhadap integritas demokrasi. Tantangan dalam mengatasi politik uang digital termasuk kesulitan dalam melacak transaksi digital, regulasi yang ketinggalan zaman, dan keterbatasan kapasitas lembaga pengawas. Teknologi seperti dompet digital dan cryptocurrency memungkinkan transaksi ilegal dilakukan secara anonim, sementara UU Pemilu belum mencakup metode baru seperti penggunaan NFT atau airdrop token. Persepsi masyarakat yang menganggap praktik ini normal, serta kejahatan lintas batas yang sulit dipantau, semakin memperburuk masalah ini. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan tentang dampak politik uang digital, tetapi juga menawarkan strategi konkret yang melibatkan regulasi, teknologi, dan partisipasi aktif masyarakat. Jika Anda ingin memahami lebih dalam tentang bagaimana teknologi dapat mempengaruhi demokrasi dan bagaimana kita bisa menjaga kedaulatan rakyat, buku ini adalah pilihan yang tepat.

Jl. Kampus UNIMA di Tondano Kelurahan Tounsaru Kecamatan Tondano
Selatan Kabupaten Minahasa - Sulawesi Utara 95618

Telp/Faks : (0431) 322452

Email : pendgeografi@unima.ac.id

: penerbit_pendidikangeografi@unima.ac.id

Website : penerbit.pgeografi.unima.ac.id